LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2022
BULAN JULI DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Rabu, 10 Agustus 2022

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang/Pejabat eselon III
3. Kepala Sub Bagian/Eselon IV dan Pejabat Fungsional
4. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji
5. Bendahara Pengeluaran Pembantu
6. Pelaksana di masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 57,35 %

b.Keuangan = 11.346.948.491 (55,19%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi		Deviasi Fisik (%)	Ket
				Fisik (%)	Keuangan (Rp)		
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI							
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.175.000			1.300.000		
1	Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan	6.175.000	50	25	1.300.000	(25)	Honor Narasumber dipindah ke SSK lain pada waktu perubahan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan							
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi							

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	14.400.000			10.669.500		
1	Pendampingan Pelaksanaan PUG di Kab/Kota	14.400.000	100	74,09	10.669.500	(25,91)	pendampingan masih berjalan untuk bulan berikutnya
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	26.060.000			839.690		
1	Penyusunan Kebijakan PUG	26.060.000	73	38	839.690	(35)	masih menunggu hasil telaah terhadap Perda PUG dari tim ahli
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	2.025.000			525.000		
1	Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan PPEP	2.025.000	50	35	525.000	(15)	
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak							
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)							
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	54.010.000			1.674.996		
1	4. Persiapan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah	6.790.000	100	24,89	1.674.996	(75,11)	SSK ini belum dilaksanakan karena menyesuaikan kegiatan Konferensi Forum Anak yang belum jadi dilaksanakan pada bulan Juli.
2	5. Pelaksanaan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah	47.220.000	100	0	0	(100)	Kegiatan Konferensi Forum Anak belum jadi dilaksanakan pada bulan Juli karena bulan Juli masih

							difokuskan pada Festival Anak Jawa Tengah
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK							
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	36.375.000			17.279.712		
1	Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO	36.375.000	100	47,50	17.279.712	(52,50)	Menyesuaikan hasil review KPPPA terkait rincian DAK Non Fisik
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Data dan Partisipasi Mayarakat							
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN							
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi							
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	40.410.000			11.864.731		
1	Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	7.466.000	100	59,28	4.094.731	(40,72)	SSK diundur pelaksanaan menyesuaikan mitra kerja BKOW
2	Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW	16.294.000	100	0	0	(100)	SSK diundur menyesuaikan mitra kerja BKOW
3	Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota	16.650.000	60	56,07	7.770.000	(3,93)	SSK diambil sewaktu-waktu menyesuaikan mitra kerja DWP

Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	10	0	0			

Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	1	0	0			

III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

Permasalahan

Pada Bulan Juli terdapat 9 kegiatan yang mengalami deviasi antara lain :

1. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Sosialisasi Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Pelatihan Pegawai;
3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pendampingan Pelaksanaan PUG di Kab/Kota;
4. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Penyusunan Kebijakan PUG;
5. Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Proses Pengambilan Keputusan;
6. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelatihan Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) dan Rapat Evaluasi dan Koordinasi Pelatihan PPEP;
7. Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi terdapat 2 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah dan Pelaksanaan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah;
8. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi terdapat 1 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO;
9. Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota terdapat 3 SSK yang mengalami deviasi negatif yaitu Persiapan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW, Pelaksanaan Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan melalui Rapat Paripurna organisasi perempuan yang tergabung dalam BKOW dan Kegiatan Perjalanan Dinas DWP Provinsi Jawa Tengah ke Kab/ Kota;
10. Kegiatan Konferensi Forum Anak belum jadi dilaksanakan pada bulan Juli (PHA);
11. SSK Persiapan Konferensi Forum Anak Jawa Tengah belum jadi dilaksanakan(PHA).

Upaya

Upaya mengatasi kendala atau permasalahan tersebut :

1. Menyesuaikan kegiatan Konferensi Forum Anak yang belum jadi dilaksanakan pada bulan Juli (Seksi PHA)
2. Bulan Juli masih difokuskan pada Festival Anak Jawa Tengah (Seksi PHA)
3. SSK Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dan TPPO menyesuaikan hasil review KPPPA terkait rincian DAK Non Fisik (SeksiÂ PA)
4. SSK diundur pelaksanaannya menyesuaikan mitra kerja BKOW (Seksi Parmas)
5. SSK diambil sewaktu-waktu menyesuaikan mitra kerja DWP (Seksi Parmas)

IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

Rencana Kegiatan Bulan Agustus :

1. Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi anggota PPT Provinsi Jawa Tengah
2. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
4. Rapat persiapan penggerakan dan bhaksos TNI Manunggal KB Kesehatan
5. Inisiasi pembentukan PATBM
6. Desk Verifikasi aplikasi SIGA dengan Kab/Kota dan OPD Prov/ Instansi vertikal
7. Workshop GDPK dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi
8. Sosialisasi Pemanfaatan GDPK Provinsi Jawa Tengah dan Kab/Kota
9. Pertemuan Rutin Pengurus Forum Anak Jawa Tengah
10. Live IG puspaga, dengan 2 narasumber: tanggal 19 Agustus, "Cerdas Bergaul, Sehat Beriteraksi" dan tanggal 26 Agustus, "Work Life Balance".

V. PENUTUP

Stressing Pengendalian :

1. Para Kabid/Kasubag/Sub Koordinator pada masing-masing bidang/seksi selalu mengontrol dan memperhatikan target kinerja baik fisik maupun keuangan serta realisasinya;
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Pencapaian target-target indikator dalam RPJMD dan RKPD harus semaksimal mungkin karena sudah memasuki tahap akhir pelaksanaan RPJMD;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya.

Capaian realisasi fisik dan keuangan Dinas Perempuan dan Anak sampai dengan bulan Juli 2022, sebagai berikut :

No	Unit Kerja	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (%)	Deviasi
1	Dinas Perempuan dan Anak	53.04	57.35	55.19	4.31
2	Sekretariat	57.83	61.52	59.47	3.69
3	Bidang KHPP	52.65	57.14	55.35	4.49
4	Bidang PHPA	22.72	23.04	21.94	0.32
5	Bidang KB KIE	64.00	75.37	72.06	11.37
6	Bidang DALDUK KS	44.35	57.58	49.39	13.23
7	Bidang Data Parmas	63.50	72.18	68.99	8.67

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan Juli 2022 untuk menjadikan periksa.

Semarang, Rabu 10 Agustus 2022

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PEMERINTAH PROVINSI DINAS PEREMPUAN DAN ANAK JAWA TENGAH

Dra. RETNO SUDEWI, Apt.MSi.MM

NIP. 196811241993102001